

**DEBOTTLENECKING PROJECT SEBAGAI SOLUSI DAMPAK EKSPOR
KOMODITAS ENERGI DALAM OPTIMALISASI MASTERPLAN 6 KORIDOR
EKONOMI INDONESIA BERBASIS *NOT BUSINESS AS USUAL*****Basudewo Krisna Jumna [✉], Detry Handayani**

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel*Sejarah Artikel:*

Diterima April 2013

Disetujui April 2013

Dipublikasikan Mei 2013

Keywords:

MP3EI;

Debottlenecking;

Energy

Abstrak

Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (*breakthrough*) *not Business As Usual*, melalui: pertama, pihak swasta akan diberikan peran penting dalam pengembangan MP3EI, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, Pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi di 8 (delapan) program utama. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh Pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Kedua, dalam rangka penguatan kebijakan, pemerintah akan melakukan penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah.

Abstract

MP3EI development done with a breakthrough approach (*breakthrough*) *not Business As Usual*, through: first, the private sector will be given a key role in the development of MP3EI, while the government will act as regulator, facilitator and catalyst. In terms of regulation, the government will deregulate (*debottlenecking*) against regulations that impede the implementation of investments in 8 (eight) main program. Facilitation and catalysis will be provided by the Government through the provision of infrastructure and provision of fiscal and non-fiscal incentives. Second, in order to strengthen the policy, the government will strengthen the coordination, synchronization and synergy between the policies of the Ministry / Agency and the Ministry / Agency with local governments

© 2013 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:Kampus Gedung C-6 lantai 1, Kampus Sekaran Gunungpati,
Semarang 50229E-mail: edaj_unnes@yahoo.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya energi, baik fosil dan terbarukan. Empat dekade terakhir Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor minyak, gas dan batubara kelas dunia. Indonesia menjadi negara urutan kedua pengekspor batubara setelah Australia. Hal ini didukung potensi yang dimiliki Indonesia yaitu kekayaan sumber daya energi dan alam, letak geografis yang strategis yaitu dekat dengan negara-negara industri di Asia Timur dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional. Ekspor energi telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan ekspor dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ketersediaan energi merupakan penggerak penting roda perekonomian. Kebutuhan energi di Indonesia diperoleh dari berbagai macam bentuk asal seperti Minyak Bumi, Gas Alam, Batubara, Hidro, atau yang sekarang menjadi perbincangan adalah biofuel. Dari berbagai macam bentuk asal tersebut, dirubah lagi menjadi bentuk energi siap pakai seperti BBM dan listrik. Bentuk energi siap pakai inilah yang digunakan untuk menggerakkan roda ekonomi bangsa Indonesia mulai dari industri sampai ke rumah tangga.

Indonesia memiliki kekayaan energi yang cukup tinggi, namun hal tersebut belum digunakan secara benar sehingga tingkat keefisienan dalam penggunaan sumber daya energi di Indonesia belum bisa secara optimal. Hal tersebut juga ditunjang dari sistem kelola energi yang semakin memburuk yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya energi berada dalam krisis energi, sehingga hal tersebut tentu sangat bermasalah bagi kelangsungan maupun keberlanjutan pembangunan ekonomi melalui sektor energi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dan fakta yang di muat di harian Kompas (31/5/2010) terlihat jelas bahwa sebenarnya Indonesia sudah berada di titik rawan krisis energi. Data yang ada menunjukkan komoditas pertambangan masih menjadi komoditas ekspor

utama Indonesia. Tiga rangking teratas nilai ekspor pertambangan dipegang oleh komoditas batu bara, gas alam, dan minyak mentah. Kemudian disusul produk mineral lain, seperti bijih besi, tembaga dan bijih nikel.

Energi memiliki peranan dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai bahan bakar untuk proses industrialisasi, sebagai bahan baku untuk proses produksi, dan sebagai komoditas ekspor. Sumber energi yang digunakan untuk keperluan domestik meliputi energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) serta energi terbarukan (tenaga air dan tenaga panas bumi). Permintaan domestik untuk energi yang semakin meningkat akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan penduduk dan perubahan gaya hidup menjadi tantangan bagi ketahanan energi serta kondisi ekonomi Indonesia.

Kekuatan ekonomi dan politik dalam negeri turut serta menentukan kelangsungan hidup dari berbagai komoditas energi yang dimiliki Indonesia. Langkah kebijakan untuk mengatasi dampak ekspor komoditas energi yang berpengaruh pada cadangan energi dalam negeri yang semakin menipis perlu segera diupayakan untuk menjaga ketahanan pasokan energi. Enam koridor ekonomi Indonesia yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025 dapat menjadi salah satu tumpuan dalam pengembangan SDA dan SDM Indonesia.

Rumusan Masalah

Pengelolaan energi untuk kebutuhan dalam negeri semakin meningkat. Dampak ekspor komoditas energi menjadikan pasokan energi didalam negeri menjadi semakin menipis. Disisi lain, meningkatnya ekspor komoditas energi memberikan dampak positif bagi perekonomian yaitu menambah pendapatan perekonomian nasional. Permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana konsep *Bottlenecking Project* Sebagai Solusi Dampak Ekspor Komoditas Energi dalam Optimalisasi *Masterplan* 6 Koridor

Ekonomi Indonesia Berbasis *Not Business As Usual*?

2. Hasil capaian apa saja yang akan diperoleh dari optimalisasi *Masterplan* 6 Koridor Ekonomi Indonesia untuk komoditas energi berbasis *not business as usual*?

Tujuan penelitian

Optimalisasi pengelolaan energi tidak hanya dapat dirasakan oleh golongan tertentu saja akan tetapi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kebutuhan energi didalam negeri dapat tercukupi tanpa harus mengorbankan cadangan energi yang ada. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan dan mengetahui bagaimana konsep *Bottlenecking Project* Sebagai Solusi Dampak Ekspor Komoditas Energi dalam Optimalisasi *Masterplan* 6 Koridor Ekonomi Indonesia Berbasis *Not Business As Usual*.
2. Untuk mengetahui Hasil capaian apa saja yang akan diperoleh dari *Masterplan* 6 Koridor Ekonomi Indonesia untuk komoditas energi berbasis *not business as usual*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan atas hasil kajian pustaka dan pengamatan. Kajian pustaka yang dilakukan melalui perolehan data-data literatur terkait judul yang diampu oleh penulis. Adapun pengamatan dilakukan dengan langkah mengamati realita yang ada dari berbagai permasalahan yang ada. Penulisan karya tulis ini juga diperlukan adanya kajian pemikiran, dimana dari kajian pemikiran inilah dihasilkan metode pelaksanaan yang mampu memberikan solusi yang tepat terkait dengan permasalahan yang ada.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah:

Merumuskan Masalah

Perumusan masalah didapat dari hasil pengamatan terhadap realita yang ada terkait dengan masalah ketahanan energi. Perumusan masalah juga tidak terlepas dari berbagai kajian para akademisi dan praktisi. Sehingga dalam tahapan ini juga tidak terlepas dari fakta-fakta

lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada baik dari para akademisi, praktisi maupun berbagai literature terkait judul yang diampu oleh peneliti.

Memilih dan Mengkaji Beberapa Literatur yang Terkait dengan penelitian

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan, memilih kemudian menyeleksi beberapa literatur yang dianggap relevan dan mampu memberikan referensi untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan atas permasalahan yang penulis ungkapkan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba untuk mengkaji, menganalisa serta menghubungkan pemikiran penulis serta kejadian yang terjadi di masyarakat, sehingga akan diperoleh suatu kajian serta analisa secara mendalam terhadap permasalahan yang penulis ungkapkan. Dengan kajian tersebut, diharapkan akan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah secara mendalam serta analisa yang jelas dan obyektif terhadap permasalahan yang akan dipecahkan.

Melakukan Pengamatan

Dalam perumusan dan penyusunan penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara tidak langsung dengan melakukan diskusi dan mengkaji beberapa artikel dan jurnal kekinian. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan ini, penulis mendapatkan beberapa informasi yang dapat membantu penyusunan penelitian ini.

Merumuskan Alternatif Pemecahan Masalah

Langkah ini berupa membuat alternatif pemecahan dengan cara melakukan penggabungan solusi dan pemikiran serta beberapa literature dengan susunan yang cukup teratur dan sistematis

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2011, produksi energi fosil mencapai 5,78 juta *barrel oil equivalent per day* (BOEPD) yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 902 ribu BOEPD, gas bumi sebesar 1.516 ribu BOEPD, dan batu bara sebesar 3.364 BOEPD. Jumlah produksi ini meningkat sekitar 1,8 persen dibandingkan produksi energi tahun 2010 yang mencapai 5,69 juta BOEPD. Pada tahun 2012, produksi energi diupayakan dapat mencapai 6,16 juta BOEPD yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 930 ribu BOPD, gas bumi sebesar 1.590 ribu BOEPD, dan batubara sebesar 3.818 ribu BOEPD. Sesuai arah kebijakan energi nasional, pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya energi terus didorong dan dikembangkan, terutama pemanfaatan panas bumi. Pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik (PLTP) berdasarkan kapasitas terpasang mengalami peningkatan sebesar 37 MW. Bila pada tahun 2010, kapasitas terpasang PLTP sebesar 1.189 MW maka pada tahun 2011 kapasitasnya dapat ditingkatkan menjadi 1.226 MW. Pada tahun 2012, kapasitas terpasang tenaga listrik yang bersumber dari panas bumi diupayakan dapat mencapai 1.341 MW. Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik, sedang dilaksanakan percepatan program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap I, 10.000 MW tahap II, dan IPP. Rasio elektrifikasi pada tahun 2011 mencapai 72,95 persen atau mengalami peningkatan sebesar 4,2 persen dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 67,2 persen. Rasio elektrifikasi di upayakan dapat meningkat menjadi 75,9 persen pada akhir tahun 2012. Rasio elektrifikasi yang meningkat didukung dengan ketersediaan kapasitas terpasang pembangkit listrik melalui penambahan rata-rata sebesar 3.000 MW per tahunnya. Pada tahun 2011, kapasitas terpasang pembangkit listrik bertambah sebesar 3.430 MW yaitu dari 33.923 MW pada tahun 2010 menjadi 37.353 MW. Kapasitas terpasang tersebut diupayakan dapat bertambah sekitar 6.300 MW pada akhir tahun 2012. Untuk mendorong investasi di bidang energi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 52

Tahun 2011 yang memberi fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah, yang antara lain mencakup 15 sektor di bidang energi dan sumber daya mineral. Selain itu, untuk mendorong penyediaan sumber energi terbarukan khususnya energi yang berasal dari nabati (biofuel), telah pula dilakukan inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar.

Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (*breakthrough*) *Not Business As Usual*, melalui: pertama, pihak swasta akan diberikan peran penting dalam pengembangan MP3EI, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, Pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi di 8 (delapan) program utama. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh Pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Kedua, dalam rangka penguatan kebijakan, pemerintah akan melakukan penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan MP3EI, dunia usaha akan menjadi aktor utama dalam kegiatan investasi, produksi dan distribusi.

Pada tahun 2012, telah direncanakan akan dilakukan *groundbreaking* terhadap 84 proyek yang terdiri dari investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan nilai total Rp. 536,3 Triliun, yang akan dibiayai oleh Pemerintah Rp. 66,2 Triliun (15 proyek), BUMN Rp. 90,3 Triliun (20 proyek), Swasta Rp. 301,6 Triliun (38 proyek), campuran Rp. 78,2 Triliun (11 proyek). Selain pembangunan infrastruktur, pada tahun 2012 telah direncanakan akan dilakukan sejumlah kegiatan untuk mendukung penguatan SDM dan IPTEK di setiap koridor ekonomi. Terkait dengan penguatan SDM telah direncanakan sebanyak 76 program dengan nilai total investasi Rp. 580 Miliar. Sedangkan untuk pengembangan IPTEK, direncanakan 134

program dengan nilai total investasi Rp. 3,8 Triliun. Selain itu, Pemerintah akan terus melakukan sejumlah perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, antara lain melalui *debottlenecking* regulasi (deregulasi) terhadap peraturan yang dinilai menjadi penghambat bagi pelaksanaan investasi. Sejak MP3EI diluncurkan, Pemerintah telah selesai melakukan revisi terhadap 28 regulasi dan saat ini sedang menyelesaikan 18 regulasi lainnya. Upaya-upaya *debottlenecking* di atas tentunya tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah terutama untuk melakukan upaya *debottlenecking* guna memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha di daerah masing-masing. Hal ini juga terkait untuk memastikan penetapan peraturan-peraturan daerah yang dapat mendukung terciptanya iklim investasi dan kepastian berusaha.

Melihat realita tersebut, optimalisasi *Masterplan* 6 Koridor Ekonomi Indonesia yang didasari oleh semangat “*Not Business As Usual*”, melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Laju perekonomian Indonesia tidak hanya ditunjang dari ekspor komoditas energi saja, akan tetapi juga dari berbagai sektor ekonomi yang lain, seperti pertanian, pariwisata dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita untuk bisa mengoptimalkan sumber daya tersebut agar bernilai kompetitif sehingga mampu bersaing dengan negara lain, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Pelaksanaan strategi ini dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama. 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis.

Strategi pelaksanaannya dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi

Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku; (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*); (3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

Percepatan dan perluasan program ini ditujukan agar sumber daya yang ada di masing-masing daerah dapat dikembangkan secara optimal tidak hanya komoditas energi tertentu, tetapi juga komoditas pertanian, industri dan sektor lainnya. Indonesia membutuhkan percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan lebih dini. Perwujudan itulah yang akan diupayakan melalui langkah-langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia demi terjaganya ketahanan energi. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (*mindset*) yang didasari oleh semangat “*Not Business as Usual*”.

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia.

Hasil capaian yang akan diperoleh dari optimalisasi *Masterplan* 6 Koridor Ekonomi Indonesia berbasis *Not Business as Usual*.

Laju pertumbuhan ekonomi yang dinilai ideal dan berkualitas, tidak terlepas dari aspek

pemerataan. Upaya pemerintah untuk mengikis kesenjangan dan pemerataan salah satunya adalah konsep penyebaran pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya terfokus di wilayah Pulau Jawa. Konsep enam koridor ekonomi diyakini mampu meningkatkan pertumbuhan di daerah agar jaraknya tidak terpaut jauh dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Koridor ekonomi memiliki fungsi strategis untuk menghasilkan dampak ekonomi nasional, khususnya industri unggulan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7% per tahun (Harian Seputar Indonesia, 11/2/2011)

Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomiyang *multiplier*-nya meliputi seluruh wilayah tanahair. Pada masing-masing koridor ekonomi akan difokuskan pada pengembangan sejumlah kegiatan ekonomi utama sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayahnya. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategi masing-masing pulau besar (sesuai dengan letak dan kedudukan geografis masing-masing pulau).

Dengan diterapkannya koridor ekonomi, PDB Indonesia akan bertumbuh lebih cepat dan lebih luas, baik untuk daerah di dalam koridor, maupun untuk di daerah di luar koridor. Pengembangan strategi ini berfokus pada 8 program utama, yaitu: pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika, dan pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama yang disesuaikan dengan potensi dan nilai strategisnya masing-masing di koridor yang bersangkutan.

Pengembangan kegiatan ekonomi utama Koridor Ekonomi membutuhkan dukungan dari sisi energi. Dengan adanya strategi ini, penambahan kebutuhan energi listrik di Indonesia hingga tahun 2025 diproyeksikan mencapai sekitar 90.000 MW (dalam kondisi beban puncak). Dari jumlah tersebut, sebagian besar kebutuhan energi akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi utama di dalam koridor. Untuk mendukung

pengembangan kegiatan ekonomi utama, telah diindikasikan nilai investasi yang akan dilakukan di keenam koridor ekonomi tersebut sebesar sekitar IDR 4.012 Triliun.

Strategi pembangunan *Masterplan* Koridor Ekonomi berbasis *Not Business as Usual* dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan. Pengembangan strategi ini dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu terobosan (*breakthrough*) dan bukan "*Business As Usual*". Dengan adanya master plan ini, diharapkan Indonesia mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan IPTEK.

Kenyataannya pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini dirasa masih kurang merta, sehingga dalam hal ini Pemerintah mendorong perluasan pembangunan ekonomi Indonesia agar efek positif dari pembangunan ekonomi Indonesia dapat dirasakan tidak saja di semua daerah di Indonesia tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat di seluruh wilayah nusantara yaitu dengan melalui pembangunan ekonomi yang sesuai bidangnya dan secara jelas sesuai dengan minat maupun keunggulan potensi wilayah masing-masing agar pembangunan ekonomi tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan nasional.

PENUTUP

Simpulan

Konsep *Debottlenecking Project* Sebagai Solusi Dampak Ekspor Komoditas Energi dalam Optimalisasi *Masterplan 6* Koridor Ekonomi Indonesia Berbasis *Not Business As Usual* dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku; (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*); (3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional. Hasil capaian yang akan diperoleh adalah pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7% per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan serta dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya golongan tertentu saja.

Saran

1. Bagi Pemerintah, meninjau kembali kebijakan tentang pengelolaan energi agar tidak terjadi eksploitasi yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak tertentu.
2. Bagi Masyarakat, untuk lebih bisa menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan sesuai kebutuhan sumber daya yang ada, agar dapat terus bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya.
3. Bagi Swasta, untuk lebih bisa menjaga dan memanfaatkan energi serta sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama serta dapat meningkatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. ----. *Launching Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*

(MP3EI). <http://www.selamatkan-indonesia.net/index.php?option=com>
[Diakses tanggal 21 April 2013]

Anonim. 2011. *Enam Upaya Indonesia Mencapai Kemandirian Energi*.

<http://www.esdm.go.id/> [Diakses tanggal 20 April 2013]

Basri, Faisal. 2009. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

Basuki, Orin. 2010. *Inilah Koridor Ekonomi Indonesia*. <http://www.kompas.com>
[Diakses tanggal 20 April 2013]

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*. <http://www.ekon.go.id/media/.../2011>
[Diakses tanggal 18 April 2013]

Partowidagdo, Widjajono. 2008. *Membangun Kemandirian Energi*. <http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues> [Diakses tanggal 17 Juni 2011]

Umargiono. 2009. *Sistem Perekonomian Indonesia*. <http://www.scribd.com/.../Bab-17-Sistem-Perekonomian-Indonesia> [Diakses tanggal 20 April 2013]

Yani, Andai. 2011. *Definisi Energi*. <http://www.id.shvoong.com> [Diakses tanggal 20 April 2013].